



# **LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA DENPASAR  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Wara Nugraha-Nya, sehingga Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, mengamanatkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk wajib menyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Dengan tersusunnya Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2025 ini, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan perencanaan tahun berikutnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Dengan langkah-langkah antisipatif melalui koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. Mudah-mudahan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar,



**Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos**

Pembina Tk.I

Nip. 197402051999031010



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN</b>	
2.1. Anggaran Belanja.....	9
2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sub Kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.....	9
<b>BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2023</b>	
3.1. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja .....	16
3.2. Kendala dan Solusi dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan .....	23
3.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar .....	24
3.4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 .....	26
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	28



## DAFTAR TABEL

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 .....	10
2.3. Evaluasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama.....	15
3.1. Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV.....	17



## **BABI**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah sebagai rencana kerja tahunan. Undang- undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sebagai tindak lanjutnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang.

Dengan munculnya konsep tata kelola yang baik (*good governance*) dan prinsip-prinsip manajemen kinerja berbasis hasil (*performance-based management*), evaluasi laporan kinerja pemerintah menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi laporan kinerja pemerintah juga menjadi sarana untuk mendorong inovasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan mengevaluasi kinerja secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem mereka dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar menyusun Laporan Realisasi Renja TW IV sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menunjukkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode triwulannya.



## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2023 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
- 12.



13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tgl 17 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tgl 17 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 52)

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Realisasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2025 dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas tentang realisasi IKU, realisasi kinerja program dan kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

Tujuan Penyusunan Laporan Realisasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam pengawasan pemerintah daerah.

### 1.4 Sistematika Penyajian Laporan Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Laporan Evaluasi Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA & PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN**



Pada bab ini memuat anggaran belanja serta evaluasi capaian atas indicator kinerja pada program/kegiatan/sub kegiatan serta realisasi keuangan.

### **BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada bab ini memuat evaluasi renja, kendala & solusi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, evaluasi capaian indicator kinerja utama serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



## BAB II

### CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN

#### 2.1. Anggaran Belanja

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2024, diundangkan pada tanggal 28 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp. 19.120.173.352,00 terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp. 8.050.343.663,00, belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.423.788.689,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.071.041.000,00. Menyikapi Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025, terdapat beberapa strategi yang telah di tempuh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Antara Lain :

- a. Belanja Daerah disusun berdasarkan skala prioritas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat ;
- b. Belanja Daerah pada tiap kegiatan diupayakan dengan tolak ukur dan target kinerjanya dalam rangka mewujudkan tujuan Organisasi ;
- c. Belanja Daerah dilaksanakan sesuai program, kegiatan yang telah ditetapkan ;
- d. Belanja Daerah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif dalam mewujudkan sasaran kinerja.

Dengan demikian pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pladfon Anggaran yang telah disepakati, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar mempunyai 5 program yang terdiri dari 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan.

#### 2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Adapun Iktisar pencapaian target kinerja & keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sampai dengan Triwulan IV dituangkan dalam tabel sebagai berikut;



Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  
Triwulan IV Tahun Anggaran 2025**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi (sesuai DPA)		Realisasi Rp.
			K	Rp.	
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota</b>	<b><i>Persentase pemenuhan Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar</i></b>	<b>100</b>	<b>13,613,383,051</b>	<b>11,472,318,680.00</b>
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	9,840,564,763	8,937,190,328
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar			-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan ASN dan sarana dan Prasarana	100%	2,817,031,358	1,840,762,259
	sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	100%	93,959,280	60,748,376
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Pengadaan Perangkat Daerah	100%	41,715,950	30,502,101
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	82,016,000	53,985,782



dan Konsultasi  
SKPD

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				-
Sub Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya dan Pajak Kendara Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	100%	630,615,700	492,125,362
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah		107,480,000	57,004,472
<b>2 Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>2,234,212,400</b>	<b>1,629,076,920</b>
Kegiatan Pengelolaan Informai dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Pembangunan Kota Denpasar kepada masyarakat			-
Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktifitas relasi media yang memenuhi kreteria		189,512,000	134,809,580
Sub Kegiatan Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendesiminasikan informasi dan terdaftar	100%	38,975,000	29,121,500
Sub Kegiatan Desiminasi informasi	Persentase khayalak yang terpaparinformasi	100%	657,275,000	483,195,482
Sub Kegiatan pengelolaan informasi publik	Jumlah media informasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola	100%	443,361,400	335,078,316



	maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kreteria/juknis			
Sub. Kegiatan Penyusunan konten	Jumlah konten informasi publik	100%	150,750,000	90,750,000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional		286,825,000	253,977,002
Sub Kegiatan Kordinasi Pelaksanaan manajemen SPBE	Jumlah dokumen kordinasi pelaksanaan manajemen SPBE		186,064,000	105,666,036
Sub kegiatan pembangunan dan atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana spbe pemerintah daerah	jumlah aplikasi khusus yang dibangun/dikembangkan sesuai arsitektur dan peta spbe		174,250,000	142,044,004
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah aplikasi spbe yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	100%	107,200,000	54,435,000
<b>3 Program Aplikasi Informatika</b>	<b><i>Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi</i></b>	<b>100%</b>	<b>2,832,175,000</b>	<b>2,153,803,101</b>
Kegiatan Pengelolaan e=government dilingkup pemerintah daerah	Jumlah perangkat daerah di kab/kota yang terhubung jaringan intra pemerintah daerah			0
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di kab/kota yang terhubung jaringan intra pemerintah daerah	<b>100%</b>	<b>2,832,175,000</b>	<b>2,153,803,101</b>
<b>4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b><i>Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar</i></b>		<b>97,250,000</b>	<b>90,364,999</b>



<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan sistem Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar			0
Sub Kegiatan peningkatan kualiatas data statistik sektoral	persentase kegiatan statistik sektoral yang dirilis tepat waktu	100	34,600,000	32,190,000
Sub Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	jumlah kegiatan statistik yang telah melengkapi metadata	100	62,650,000	58,174,999
<b>5 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar</b>	<b>100.00</b>	<b>184,219,000</b>	
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar			0
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan kemamanan informasi	100	184,219,000	166390854



Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, terdapat beberapa evaluasi yang dapat disimpulkan meliputi:

1. **Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dalam pelaksanaan Triwulan IV Tahun anggaran 2025, Proses pengadaan barang dan jasa belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan terkendala dengan proses pengadaan yang menggunakan Aplikasi e-catalog serta pemenuhan TKDN.

2. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun anggaran 2025, pencapaian realisasi telah mencapai nilai 97 %.

3. **Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan**

Faktor – faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah

- Proses pengadaan harus mempertimbangkan penggunaan produksi dalam negeri (TKDN)
- Proses adaptasi penggunaan e- Catalog dalam memproses pesanan
- Belum optimalnya penerapan perencanaan dan anggaran

Faktor – faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang belum memahami teknologi secara optimal
- Penerapan Adaptasi kebiasaan Baru dengan bantuan teknologi informasi
- Telah Optimalnya koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan



4. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk mempermudah masyarakat berpartisipasi didalam pembangunan khususnya di Kota Denpasar. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi akan dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien dan efektif sehingga Meningkatkan Pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Guna Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas (Smart city)

5. **Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

- Merencanakan secara cermat proses perencanaan dan penganggaran agar dapat memenuhi Target yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia



### **BAB III**

## **EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2025**

### **3.1 EVALUASI TERHADAP RENCANA KERJA (RENJA)**

Pelaksanaan evaluasi ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sudah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp. 15.564.111.804,- atau 81.81% dari total anggaran sebesar Rp. 18.961.239.451,-, yang dijabarkan pada table berikut ini;



**Tabel 3.1**  
**Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025**

NO	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
						I		II		III		IV			
1	2		3	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
1	-Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100	5.836.390.289	20	1,495,531,667	20	1,877,093,629	20	2,531,102,829	20	3,033,462,203	40	8,937,190,328
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah														



Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

2	-Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Terpenuhiya Pemenuhan Kebutuhan ASN dan sarana dan Prasarana	100	3.471.899.664	20	420,728,500	20	675,291,890	20	224,441,506	20	520,300,363	40	1,840,762,259
3	-Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	100	112.913.968	20	10,800,000	20	9,146,152	20	25,356,244	20	15,445,980	40	60,748,376
4	-Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terpenuhiya Barang Cetak dan Pengadaan Perangkat Daerah	100	52.115.150			20	1,215,600	20	17,022,155	60	12,264,346	20	30,502,101
5	-Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terpenuhiya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	78.928.000			20	5,930,662	30	13,743,820	50	34,311,300	40	53,985,782
<b>III</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>														
6	-Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya dan Pajak Kendara Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	100	517.115.336	20	54,802,300	20	89,964,400	20	144,726,971	20	202,631,691	40	492,125,362
7	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	100	163.017.451			20	2,750,000	30	27,112,933	50	27,141,539	20	57,004,472



Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

<b>IV</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>														
8	Sub Kegiatan Relasi Media		Jumlah aktifitas relasi media yang memenuhi kriteria	100	189,512,000			40	3,600,000			60	131,209,580	40	134,809,580
9	Sub Kegiatan Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat		Jumlah komunitas informasi yang aktif mendesiminasikan informasi dan terdaftar	100	38,975,000	10	2,010,000	20	10,109,000	20	10,972,500	50	6,030,000	40	29,121,500
10	Sub Kegiatan Desiminasi informasi		Persentase khayalak yang terpaparinformasi	100	657,275,000	20	91,605,000	20	322,577,000	20	28,495,000	20	40,518,482	40	483,195,482
11	Sub Kegiatan pengelolaan informasi publik		Jumlah media informasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		443,361,400	20	39,129,840	20	45,022,855	20	80,027,561	20	170,898,060	20	335,078,316
12	Sub. Kegiatan Penyusunan konten		Jumlah konten informasi publik		150,750,000	20	20,225,000	20	20,000,000	20	30,000,000	20	20,525,000	20	90,750,000
13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah		Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional		286,825,000	15	4,062,000	20	4,150,000	20	234,940,002	20	10,825,000	20	253,977,002
14	Sub Kegiatan Kordinasi Pelaksanaan manajemen SPBE		Jumlah dokumen kordinasi pelaksanaan manajemen SPBE		186,064,000	10	600,000			40	1,950,000	50	103,116,036	20	105,666,036



Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

15	Sub kegiatan pembangunan dan atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana spbe pemerintah daerah		jumlah aplikasi khusus yang dibangun/dikembangkan sesuai arsitektur dan peta spbe		174,250,000	10	750,000	20	750,000	50	95,889,000	20	44,655,004	20	142,044,004
16	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		jumlah aplikasi spbe yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah		107,200,000	10	1,005,000	10	1,380,000			80	52,050,000	20	54,435,000



<b>VII</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>													
17	Sub Kegiatan peningkatan kualitas data statistik sektoral		persentase kegiatan statistik sektoral yang dirilis tepat waktu		34,600,000				20	990,000	80	31,200,000	100	32,190,000
18	Sub Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia		jumlah kegiatan statistik yang telah melengkapi metadata		62,650,000		20	28,850,000	20	21,924,999	60	7,400,000	20	58,174,999
<b>VIII</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>													



Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025

19	-Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan kemamanan informasi	100	184,219,000		20	12,072,000	80	114,763,330	39555524	40	166,390,854
				18,961,239,451	2,141,249,307.00		3,779,119,188		4,000,099,048	3,845,557,422		15,511,954,554.00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) :											39,20	
Predikat Kinerja :											SR	
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												
JUMLAH REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)											38	39,20
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)											SR	SR



### **3.2 KENDALA & SOLUSI DALAM PERNCAPAIAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Dalam hal pencapaian pelaksanaan target kinerja terdapat kendala yang dialami di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar:

- a. Beberapa sarana dan prasarana belum memerlukan perawatan (masih dalam garansi)
- b. Adanya efisiensi anggaran dalam belanja (penganggaran dalam SSH SIPD), dimana terjadi negosiasi harga barang menyesuaikan kebutuhan.

Adapun dalam menghadapi kendala tersebut, berikut solusi yang dilaksanakan;

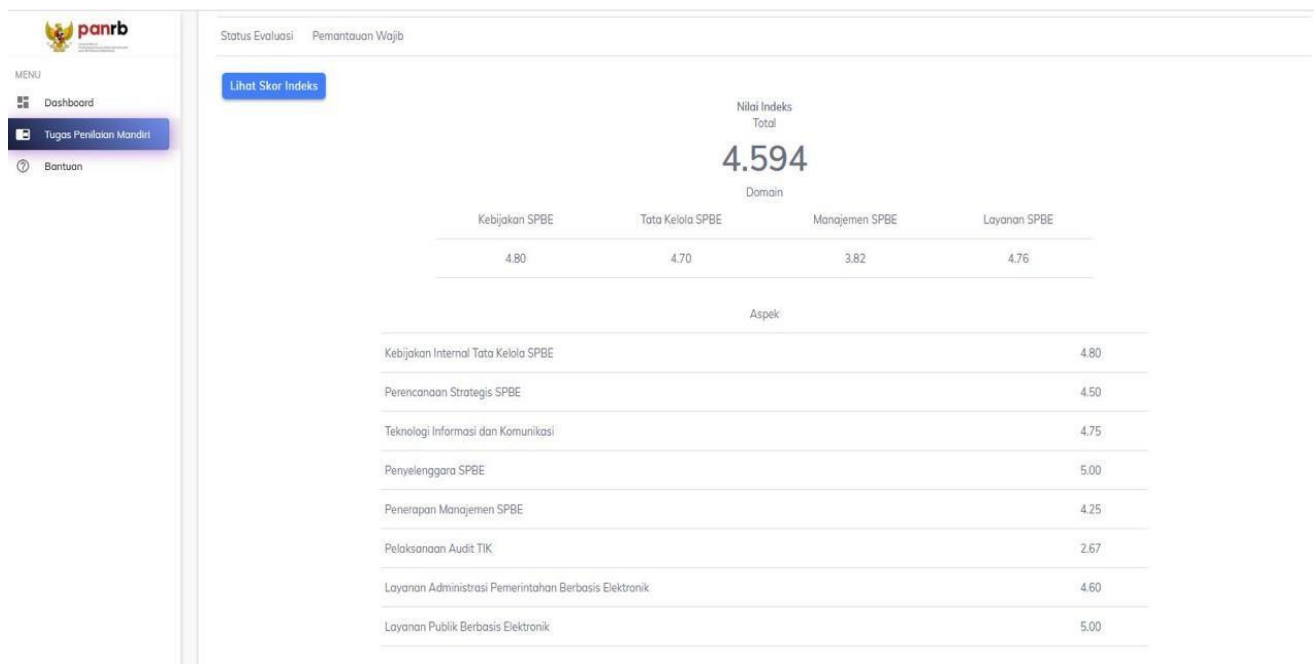
- a. Membuat buku penjagaan sesuai dengan umur ekonomis barang/aset
- b. Berkonsultasi dengan Instansi terkait BPKAD dan mengusulkan SSH sesuai harga yang sebenarnya.



### 3.3 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI ,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025

## INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA DENPASAR

**3,8**  
(Sangat Baik)



### Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



<b>Nama Indeks</b>	<b>Nilai 2025</b>
SPBE	3,8
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	4.80
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,60
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	4.70
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,50
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	3.82
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	3,50
<i>Audit TIK</i>	3,33
<b>Domain Layanan SPBE</b>	4,76
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,67



## BAB IV P E N U T U P

Demikianlah Laporan Evaluasi Rencana Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, dengan disusunnya Laporan Evaluasi ini merupakan symbol implementasi dari Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, dengan memperhatikan aspek-aspek kebutuhan yang bersifat strategis namun didasari bahwa masih terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi.

Untuk hal itu perlu adanya penyempurnaan dalam pelaksanaan isi laporan Evaluasi Rencana Kerja yang mana merupakan hal penting dan perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar baik berupa saran, pendapat serta kritik dalam proses perbaikan dan penyempurnaan Laporan Evaluasi Rencana Kerja ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Denpasar



**Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos**  
Pembina Tk.I

Nip. 197402051999031010

